



# Local Fishers' Understanding of the Implementation Efforts of the Measured Fishing Policy: A Case Study in the Banda Islands, Central Maluku

(Pemahaman Nelayan Lokal Terhadap Upaya Implementasi Penangkapan Ikan Terukur: Studi Kasus di Kepulauan Banda, Maluku Tengah)

Putri Hastari<sup>1</sup>, Ruslan H. S Tawari<sup>2✉</sup> dan Haruna<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Kelautan, Pascasarjana Universitas Pattimura. Jl. Ir. M. Putuhena, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Indonesia.

<sup>2</sup> Program Studi Pemanfaatan Sumber daya Perikanan-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura. Jl. Mr. Chr. Soplanit, Kampus Poka Ambon Maluku 97233 Indonesia. Indonesia.

Email: [putrihastari58@gmail.com](mailto:putrihastari58@gmail.com)

## Article Info:

Received : 9 Sept. 2025  
Accepted : 28 Okt. 2025  
Online : 29 Okt. 2025

## Article type :

<input type="checkbox"/>	Riview Article
<input type="checkbox"/>	Common Serv. Article
<input checked="" type="checkbox"/>	Research Article

## Keyword :

Measured Fishing, Quota, Fisher Perception, Fishing Gear, Socio-Economic

## Corresponding Author :

Putri Hastari  
Universitas Pattimura.  
Ambon, Indonesia

Email :  
[putrihastari58@gmail.com](mailto:putrihastari58@gmail.com)

## Abstract

The Measured Fishing Policy (Penangkapan Ikan Terukur/PIT) is a recent initiative in Indonesia's fisheries management, grounded in quota allocation, spatial zoning, and sustainability principles. This policy aims to balance the utilization of marine resources with environmental conservation, while ensuring economic equity for local small-scale fishers. This study aims to assess the level of understanding among small-scale fishers in the Banda Islands, Central Maluku, regarding the full implementation of PIT, particularly in terms of zoning, gear and vessel standards, administrative procedures, socio-economic impacts, and government outreach. A descriptive quantitative approach was employed, using purposive sampling of 95 active fishers from eight villages across three main islands. Data were collected through structured Likert-scale questionnaires and field interviews. The results indicate that most fishers have limited understanding of key technical aspects, such as legal fishing gear (63.16% lack awareness), catch reporting procedures (50.53% unaware), and post-production non-tax revenue (PNBP) mechanisms (69.47% do not understand). However, there is a relatively positive perception of the policy's economic implications, particularly in terms of operational efficiency (61.06%), income potential (63.16%), and the role of customary leaders (72.63%). In conclusion, while fishers' overall understanding of PIT remains insufficient, there is an encouraging acceptance of its objectives. To ensure effective implementation, enhanced outreach, adaptive technical assistance, and active involvement of local institutions are essential. It is recommended that the government adopt participatory communication and locally contextualized education strategies to support inclusive and sustainable PIT implementation in archipelagic regions.



Copyright©2025, Putri Hastari, Ruslan H. S Tawari, Haruna

## I. PENDAHULUAN

Sektor perikanan tangkap merupakan salah satu pilar utama pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia. Berperan penting mendukung ketahanan pangan nasional, sektor ini

juga menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir serta kontributor signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Akan tetapi, dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi aktivitas penangkapan ikan yang tidak terkendali,

praktik *illegal fishing*, dan lemahnya sistem tata kelola telah menyebabkan penurunan stok ikan di berbagai wilayah perairan (Suman et al, 2016; Radjak et al, 2021; Ritonga et al, 2024). Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi bagi komunitas nelayan kecil (Suherman et al., 2025).

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 yang mengusung sistem kuota penangkapan ikan berdasarkan zonasi wilayah, jenis kapal, dan kapasitas produksi. Dalam kebijakan ini, kuota dibagi menjadi tiga kategori utama: kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota non-komersial. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan efisiensi usaha, serta memastikan pemerataan manfaat ekonomi secara adil dan inklusif (Trenggono, 2023).

Penerapan kebijakan PIT saat ini membawa tantangan baru, terutama bagi komunitas nelayan kecil di wilayah kepulauan. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Kepulauan Banda di Kabupaten Maluku Tengah. Wilayah ini dikenal sebagai sentra perikanan tradisional yang masyarakatnya sangat bergantung pada hasil laut sebagai sumber utama mata pencaharian. Karakteristik sosial masyarakat Banda mencerminkan dominasi nelayan kecil, penggunaan alat tangkap tradisional, serta kuatnya peran adat dan nilai-nilai lokal dalam struktur kehidupan sosial ekonomi (Latora., 2024).

Nelayan di wilayah ini umumnya menggunakan alat tangkap tradisional dan hidup dalam sistem sosial yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Kondisi ini menjadikan implementasi kebijakan seperti PIT berpotensi menimbulkan tantangan tersendiri, baik secara teknis maupun sosial-kultural. Meski kebijakan PIT belum secara penuh diterapkan di Banda, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal masyarakat nelayan terhadap kebijakan tersebut. Pemahaman ini akan menentukan keberhasilan kebijakan di masa depan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap standar alat tangkap yang ditentukan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan.

Menurut Tawari et al., (2025) bahwa hasil awal studi di Banda, ditemukan persepsi nelayan terhadap konsep kuota masih bervariasi, survei menunjukkan bahwa 36,61% nelayan belum memahami kebijakan PIT, sedangkan 35,92% mengaku telah memahaminya dengan baik. Kesenjangan ini disebabkan oleh rendahnya intensitas sosialisasi, kompleksitas sistem administrasi, dan keterbatasan akses informasi di tingkat akar rumput. Di sisi lain, sebagian besar nelayan memiliki pandangan positif terhadap kebijakan PIT, terutama dalam hal peluang peningkatan hasil tangkapan, harga jual ikan, dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, kekhawatiran tetap muncul, khususnya terkait potensi pembatasan hasil tangkapan, ketidakjelasan manfaat ekonomi yang diterima, serta minimnya pelibatan kelembagaan lokal dalam implementasi kebijakan (Nurlaela et al., 2025).

Kebijakan PIT merupakan bagian dari agenda transformasi ekonomi biru dan penguatan kedaulatan maritim Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan ini dapat diterima oleh komunitas nelayan, serta sejauh mana proses implementasinya melibatkan masyarakat lokal secara baik. Pelibatan lembaga adat, penguatan kapasitas kelembagaan nelayan, dan pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan kuota secara adil dan berkelanjutan (Suherman et al., 2025).

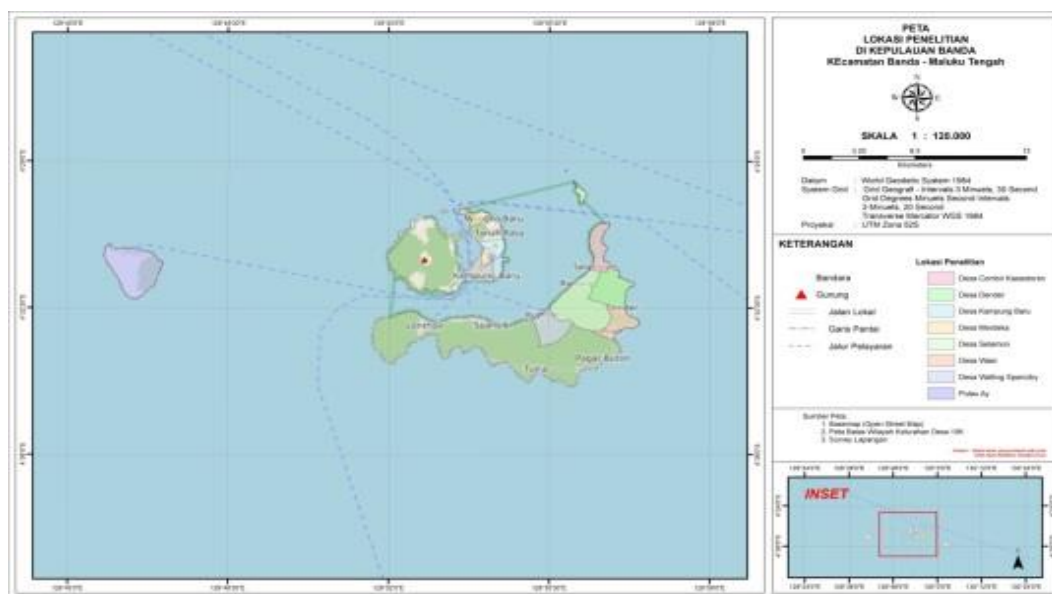
Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris mengenai pemahaman masyarakat nelayan terhadap kebijakan PIT, khususnya di wilayah-wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat nelayan di Kepulauan Banda terhadap implementasi kebijakan PIT dengan fokus pada zonasi wilayah penangkapan, standar alat tangkap dan kapal, prosedur dan administrasi, dampak ekonomi dan sosial, serta sosialisasi dan pendampingan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola perikanan berbasis komunitas yang inklusif dan berkeadilan, serta menjadi dasar kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial masyarakat nelayan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2024 dan berlokasi di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah,

Provinsi Maluku. Pengambilan data dilakukan di tiga pulau yang mencakup delapan desa, yaitu Desa Kumber, Waer, Dender, Selamon, dan Walang di Pulau Banda; Desa Merdeka dan Kampung Baru di Pulau Neira; serta Desa Ay di Pulau Ay (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### 2.2. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan diskusi mendalam dengan nelayan di Kepulauan Banda untuk memahami respons mereka terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dalam aspek sosial, ekonomi, dan operasional. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur yang relevan sebagai pelengkap analisis.

### 2.3. Teknik Pengumpulan Data

Jumlah responden dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin (Sangadji et al., 2025) dengan tingkat kesalahan 10%, yang bertujuan untuk memperoleh sampel yang proporsional terhadap populasi. Dari total 1.918 nelayan aktif di Kepulauan Banda, diperoleh 95 orang sebagai sampel penelitian. Pemilihan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yakni metode non-probabilitas yang dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian (Mulyana et al., 2024). Responden yang dipilih adalah nelayan lokal skala kecil yang aktif melaut dan memiliki pengalaman langsung terhadap perubahan kebijakan perikanan, khususnya PIT. Sebanyak 95

responden berasal dari beragam latar belakang jenis alat tangkap, usia, pendidikan, dan pengalaman, sehingga mencerminkan gambaran sosial ekonomi serta persepsi mereka terhadap implementasi kebijakan PIT. Sebanyak 95 responden dari delapan desa di Kepulauan Banda menggunakan berbagai jenis alat tangkap, dengan dominasi pancing ulur tuna (32 orang), gillnet (28 orang), dan pancing ikan dasar (22 orang). Alat tangkap lain seperti bubu digunakan oleh 8 orang dan purse seine oleh 5 orang. Distribusi alat tangkap tersebar merata di seluruh desa, dengan variasi paling beragam terdapat di Desa Kampung Baru, Merdeka, dan Walang.

### 2.4. Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif dan menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi nelayan terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Analisis dilakukan berdasarkan data wawancara lapangan di Kepulauan Banda, dengan fokus pada variabel seperti pada aspek-aspek peran pemimpin adat, harga jual hasil tangkapan, kesempatan kerja, kesejahteraan tenaga kerja, pendapatan, biaya operasional, dan pelestarian adat istiadat lokal. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diagram, serta diolah menggunakan

Microsoft Excel secara kategoris. Skala Likert digunakan dengan tiga pilihan jawaban: Sangat Setuju (3), Setuju (2), dan Kurang Setuju (1) untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan terkait kebijakan PIT.

Tabel 1. Instrumen Skala Likert

No	Skala Pengukuran	Bobot
1	Sangat Setuju (SS)	3
2	Setuju (S)	2
3	Kurang Setuju (KS)	1

Sumber: Sugiyono, (2019).

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif merupakan metode analisis data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung ataupun diukur. Metode ini bertujuan untuk menguji kebenaran data dalam penentuan dan kebenaran data dalam pemecahan masalah penelitian (Sugiyono, 2019). Analisis kuantitatif dilakukan secara sederhana dengan menggunakan rumus:

$$Persentase = \frac{Frekuensi}{Total} \times 100$$

Dimana: Frekuensi = Jumlah jawaban responden, Total = Total seluruh responden

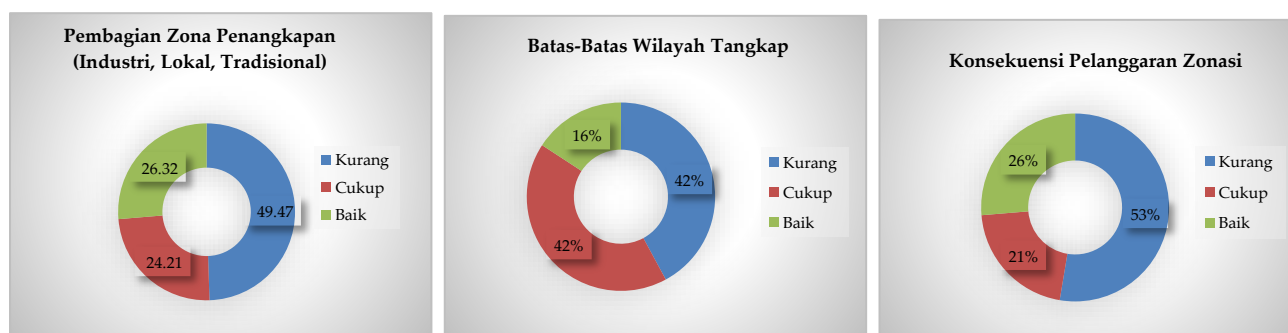
### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pemahaman Nelayan Tentang Zonasi Wilayah Penangkapan

Pemahaman nelayan di Kepulauan Banda terhadap aspek zonasi dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih tergolong rendah. Sebanyak 49,47% responden tidak memahami pembagian zona penangkapan (industri, lokal, tradisional), dan hanya 26,32% yang memahami dengan baik. Hal ini mencerminkan minimnya literasi spasial nelayan terhadap kebijakan zonasi yang esensial dalam mendukung pengelolaan perikanan berbasis wilayah.

Pemahaman terhadap batas wilayah tangkap berdasarkan kategori kapal juga belum optimal. Sebanyak 42,11% nelayan tidak memahami ketentuan ini dan hanya 15,79% yang benar-benar paham. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan informasi teknis yang diterima nelayan terkait pengelompokan kapal dan wilayah operasionalnya.

Sebanyak 52,63% nelayan tidak mengetahui konsekuensi hukum dari pelanggaran zonasi yang berisiko menimbulkan pelanggaran tidak disengaja. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi sosialisasi yang lebih intensif dan kontekstual, agar nelayan memahami pentingnya zonasi sebagai bagian dari upaya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (Deswati et al., 2021; Saleh & Marzaman, 2024).



Gambar 2. Pemahaman nelayan terkait Zonasi Wilayah Penangkapan

#### 3.2. Pemahaman Nelayan Tentang Standar Alat Tangkap dan Kapal

Mayoritas nelayan di Kepulauan Banda masih memiliki pemahaman rendah terhadap standar alat tangkap dan kapal yang diatur dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Sebanyak 63,16% nelayan tidak mengetahui jenis alat tangkap yang legal, dan persentase serupa tidak memahami larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan. Sementara itu,

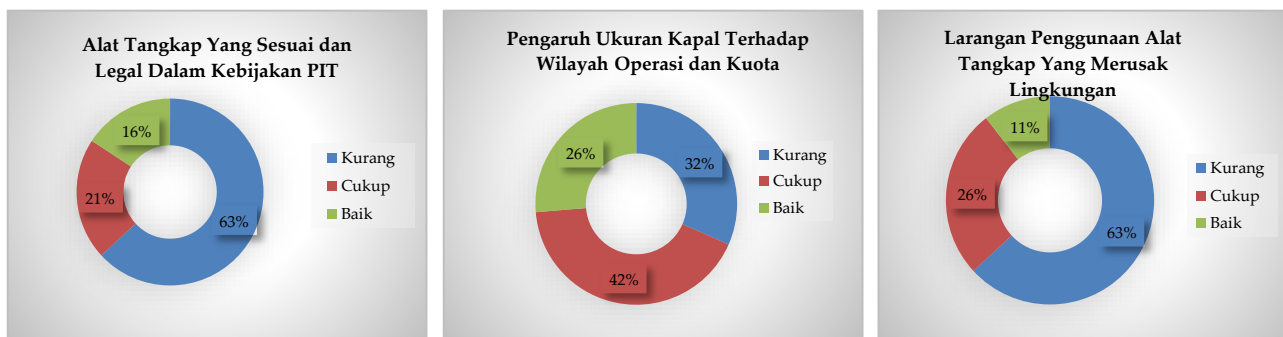
pemahaman terkait pengaruh ukuran kapal terhadap wilayah operasi dan kuota masih terbatas, dengan hanya 26,32% nelayan yang benar-benar memahami aspek ini secara baik.

Minimnya pemahaman ini menjadi tantangan dalam konteks implementasi kebijakan PIT, karena alat tangkap dan ukuran kapal adalah variabel utama dalam pengaturan zonasi dan kuota penangkapan. Menurut Tawari et al. (2025) bahwa rendahnya literasi teknis nelayan menyebabkan

resistensi terhadap kebijakan baru, terutama jika tidak disertai sosialisasi yang inklusif dan teknis. Dukungan literatur lain menegaskan bahwa kebijakan berbasis kuota memerlukan pemahaman mendalam dari pelaku utama agar mampu berjalan efektif dan adil (Zulham et al., 2022; Yusuf, 2024).

Strategi komunikasi pemerintah dinilai belum efektif pada aspek teknis ini. Penelitian Gerungan et al. (2024) menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi satu arah tidak cukup

membangun persepsi positif, khususnya terhadap aspek teknis kebijakan seperti legalitas alat tangkap dan zonasi kapal. Oleh karena itu, pelibatan langsung nelayan melalui pelatihan, penyuluhan berbasis komunitas, dan pendampingan adaptif perlu ditingkatkan agar kebijakan PIT tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dan dijalankan secara benar oleh nelayan lokal.

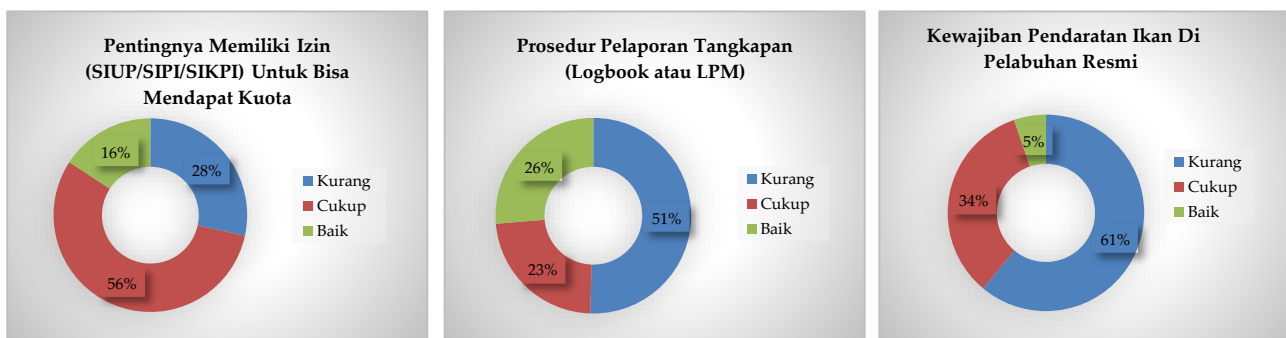


Gambar 3. Pemahaman nelayan tentang standar alat tangkap dan kapal

### 3.3. Pemahaman Nelayan Tentang Prosedur dan Administrasi

Pemahaman nelayan terhadap aspek prosedural dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menunjukkan kecenderungan yang

belum merata. Sebanyak 55,79% nelayan cukup memahami pentingnya memiliki izin perikanan seperti SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagai syarat untuk memperoleh kuota, namun hanya 15,79% yang benar-benar memahami dengan baik.



Gambar 4. Pemahaman nelayan tentang Prosedur dan Administrasi

Informasi ini bahwa aspek legalitas usaha mulai dikenali, tetapi belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh. Sebaliknya, pemahaman terhadap prosedur pelaporan tangkapan dan kewajiban pendaratan di pelabuhan resmi masih tergolong rendah. Sebanyak 50,53% nelayan tidak mengetahui mekanisme pelaporan tangkapan melalui logbook atau LPM, dan 61,05% tidak memahami kewajiban pendaratan ikan di pelabuhan resmi. Padahal, kedua prosedur ini merupakan elemen utama dalam sistem pengawasan dan evaluasi PIT. Kondisi ini memperkuat temuan Tawari et al. (2025) bahwa

keberhasilan PIT sangat bergantung pada kemampuan nelayan dalam memahami dan menjalankan prosedur administratif yang ditetapkan. Ketimpangan ini juga mencerminkan kurangnya efektivitas dalam sosialisasi kebijakan, terutama pada aspek teknis administrasi yang kerap dianggap rumit oleh nelayan kecil. Maka dari itu, edukasi yang lebih praktis dan pendampingan langsung di lapangan menjadi krusial agar implementasi PIT berjalan akuntabel dan inklusif.

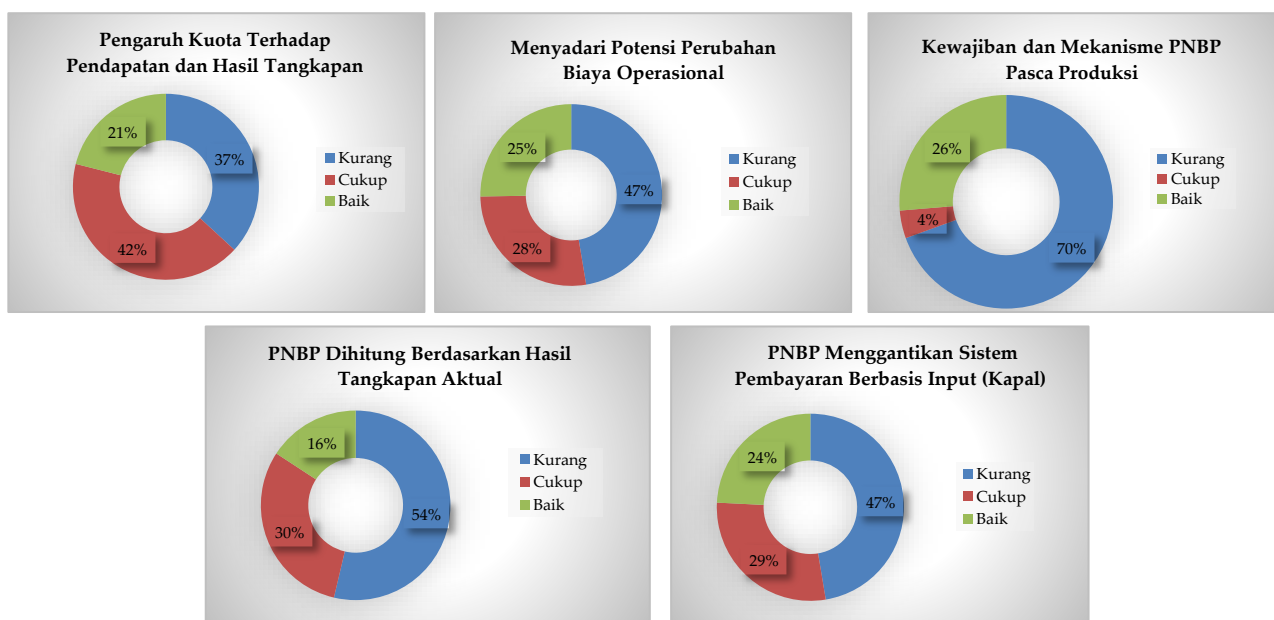
### 3.4. Pemahaman Nelayan Tentang Dampak Ekonomi dan Sosial

Pemahaman nelayan terhadap dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih tergolong rendah, terutama dalam hal mekanisme baru Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kini berbasis hasil tangkapan (output). Data menunjukkan bahwa 69,47% nelayan tidak memahami sistem ini, dan 53,68% tidak mengetahui bahwa nilai PNBP dihitung dari hasil tangkapan aktual, bukan lagi berdasarkan kapasitas kapal. Ketidaktahuan ini berpotensi menimbulkan resistensi di kalangan nelayan karena sistem yang berbasis output dinilai lebih transparan namun juga lebih kompleks secara administratif. Penelitian Yusuf (2024) menegaskan bahwa literasi ekonomi dan persepsi nelayan sangat menentukan keberhasilan transisi kebijakan perikanan berbasis kuota dan hasil tangkapan. Persepsi terhadap dampak ekonomi dan sosial suatu kebijakan berkorelasi langsung dengan kerentanan sosial masyarakat dalam menghadapi perubahan kebijakan (Dewi et al., 2020).

Pemahaman nelayan terhadap dampak kuota terhadap pendapatan dan struktur biaya operasional juga masih terbatas. Hanya 21,05% responden yang menyadari bahwa kebijakan kuota

dapat mempengaruhi hasil tangkapan dan pendapatan, sementara 25,26% memahami bahwa sistem PIT dapat mengubah struktur biaya operasional. Mayoritas nelayan belum mampu mengantisipasi implikasi ekonomi dari kebijakan ini secara utuh. Pengembangan kawasan minapolitan menemukan bahwa dimensi sosial dalam pembangunan perikanan sering terabaikan karena rendahnya akses informasi dan pendidikan ekonomi di kalangan masyarakat pesisir (Wibowo, 2014).

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan komunikasi ekonomi yang lebih sederhana, kontekstual, dan berbasis lokal agar kebijakan PIT dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh seluruh kelompok nelayan. Pendekatan teknokratis dan bersifat top-down terbukti kurang efektif menjangkau nelayan tradisional. Pentingnya peningkatan literasi, pendidikan, dan pemberdayaan komunitas nelayan sebagai strategi untuk mendorong keberhasilan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan (Paembong et al., 2023). Tanpa pemahaman yang memadai, nelayan akan tetap berada dalam posisi rentan dan tidak siap menghadapi kompleksitas kebijakan perikanan yang terus berkembang.



Gambar 5. Pemahaman nelayan tentang dampak ekonomi dan sosial

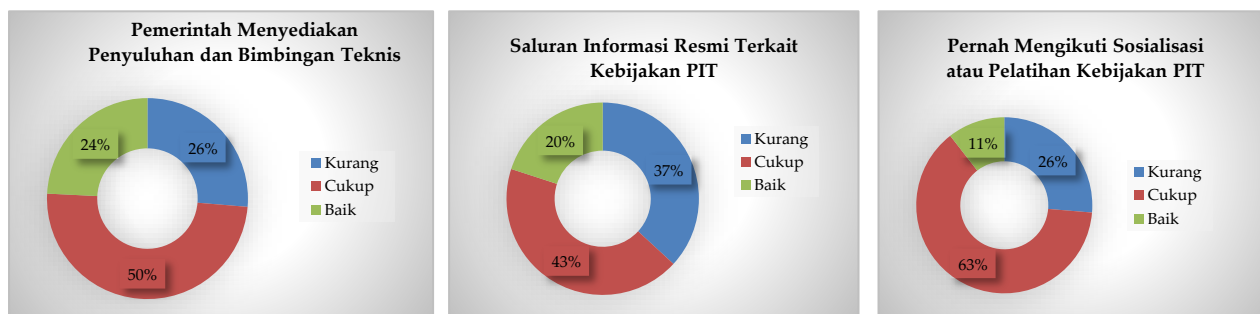
### 3.5. Pemahaman Nelayan Tentang Sosialisasi dan Pendampingan

Pemahaman nelayan terhadap kegiatan sosialisasi dan pendampingan terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara

tingkat pengetahuan umum dan keterlibatan aktif. Meskipun hampir setengah dari responden (49,47%) menyatakan cukup mengetahui bahwa pemerintah menyediakan penyuluhan dan bimbingan teknis, hanya 10,53% yang pernah benar-benar mengikuti sosialisasi atau pelatihan

mengenai PIT. Ketimpangan ini menandakan adanya kelemahan dalam strategi penyampaian informasi dan pendekatan partisipatif pemerintah kepada komunitas nelayan. Dalam konteks akademik, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori komunikasi partisipatif, di mana

keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana aktor utama—dalam hal ini nelayan—dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pemahaman kebijakan (Servaes, 2008).



Gambar 6. Pemahaman nelayan tentang Sosialisasi dan Pendampingan

Literatur nasional juga menguatkan pentingnya sosialisasi dan pendampingan dalam implementasi kebijakan sektor kelautan. Pengembangan kawasan minapolitan menunjukkan bahwa rendahnya keberlanjutan program perikanan sering kali berkaitan dengan minimnya frekuensi penyuluhan dan lemahnya kapasitas lembaga penyuluh dalam menjangkau masyarakat secara merata (Wibowo, 2014). Studi tersebut menyimpulkan bahwa pelibatan aktif masyarakat dalam bentuk penyuluhan langsung dan pendampingan teknis yang berkesinambungan mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan perikanan.

Secara internasional, pendekatan partisipatif dalam penyuluhan perikanan telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan kebijakan. Misalnya, FAO (2022) dalam laporan tentang responsible fisheries governance menekankan bahwa kebijakan perikanan yang kompleks seperti sistem berbasis kuota memerlukan strategi komunikasi berjenjang dan pelatihan berkelanjutan agar bisa dipahami oleh masyarakat nelayan dengan latar belakang pendidikan dan akses informasi yang beragam.

Sosialisasi yang bersifat satu arah, top-down, atau berbasis dokumen cenderung gagal membangun rasa memiliki dan pemahaman substantif di tingkat akar rumput.

#### IV. PENUTUP

Pemahaman nelayan di Kepulauan Banda terhadap kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) masih tergolong rendah, terutama dalam aspek teknis dan administratif seperti zonasi penangkapan, standar alat tangkap, pelaporan hasil tangkapan, serta mekanisme PNBK pasca produksi. Sebagian besar nelayan belum memahami substansi kebijakan secara menyeluruh, meskipun terdapat indikasi dukungan terhadap prinsip keberlanjutan dan efisiensi yang diusung PIT. Responden menunjukkan persepsi positif terhadap potensi dampak ekonomi kebijakan, seperti efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, dan peran pemimpin adat. Keberhasilan implementasi PIT ke depan akan sangat ditentukan oleh peningkatan literasi kebijakan melalui sosialisasi intensif, penguatan kapasitas kelembagaan nelayan, serta pendekatan partisipatif yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai lokal.

#### REFERENSI

- Deswati, D., Muliawa, A., & Muhammad, I. (2021). Persepsi terhadap kebijakan pemberlakuan kembali izin usaha perikanan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 13(2), 109–120.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2022). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2022: Towards Blue Transformation*. FAO

- Gerungan, K. K. I., Darmastuti, R., & Kristiyani, D. N. (2024). Strategi Komunikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Mensosialisasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (Studi Kasus Nelayan Kota Tegal). *Scriptura*, 14(1), 1-13.
- Latora, R. (2024). Transendensi Kasi Makan Laut dalam Ritual Adat di Kepulauan Banda. *BANDA HISTORIA: Journal of History Education and Cultural Studies*, 2(2), 17-25.
- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., ... & Martono, S. M. (2024). Metode penelitian kualitatif. Penerbit Widina
- Nurlaela, E., Ripaldi, M., Saputra, A., Choerudin, H., & Nababan, S. P. (2025). Efektivitas Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Dan Mekanisme Pnbp Pasca Produksi Di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidang Lor Jawa Tengah. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 9(2), 155-173.
- Radjak, S. A., Tupamahu, A., Tuapetel, F., Haruna, H., & Tawari, R. H. (2021). Utilization and surveillance of Fisheries Tuna Resources as a Basis for Prevention of IUU Fishing in Seram Sea. *Agribisnis: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 14(1), 135-140
- Ritonga, K.S., Herman, E., Simanjorang, F. (2024). Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destructive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(1), 185-199.
- Saleh, SR, & Marzaman, AP (2024). Integrasi Ekosistem Karbon Biru dalam Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Indonesia. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* , 1 (6), 11-24.
- Sangadji, M., Pattimahu, T. V., Haruna & Tawari, R.H.S. (2025). Household Income Diversification Strategy for Tuna Fishermen in Tehoru District, Central Maluku Regency, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries*. Vol. 29(2): 2931 – 2944 (2025).
- Servaes, J. (2022). Komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial. Dalam buku pegangan Routledge tentang komunikasi nirlaba (hlm. 23-31). Routledge.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suherman, A., Hernuryadin, Y., Suadela, P., Furkon, U. A., & Amboro, T. (2025). Transformation of Indonesian capture fisheries governance: Review and prospects. *Marine Policy*, 174, 106619.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2016). Potensi dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) Tahun 2015 serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97-100.
- Tawari, R.H.S., Hastari, P., & Haruna. (2025). Persepsi Penerapan Kebijakan Kuota Dan Dampaknya Bagi Nelayan Lokal Dalam Skema Penangkapan Ikan Terukur Di Kepulauan Banda. *AMANISAL: Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap PSP FPIK Unpatti-Ambon*. ISSN: 2085-5109
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan (JKPT)*, 1, 1-8.
- Yusuf, M. (2024). Peningkatan penerimaan negara bukan pajak melalui model kebijakan perikanan tangkap berbasis penangkapan ikan terukur. *Jurnal Studi Transformasi Indonesia Indonesian Journal of Transformation Studies*, 1(1).
- Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian nelayan skala kecil di zona penangkapan ikan perikanan industri dalam mendukung rencana kebijakan penangkapan ikan terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2), 89-101.